

PENGARUH AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIAMIS

Mohamad Apip
Fakultas Ekonomi Universitas Galuh Ciamis
apip.ciamis@gmail.com

Fitri Maesaroh
Fakultas Ekonomi Universitas Galuh Ciamis
maesarohfitri@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini difokuskan pada Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Transparansi Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis. Tujuan dalam Penelitian ini untuk mempelajari, mengetahui, dan menganalisis: (1) Aksesibilitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis. (2) Transparansi laporan keuangan daerah Kabupaten Ciamis. (3) Pengaruh aksesibilitas laporan keuangan Pemerintah Daerah terhadap transparansi laporan keuangan daerah Kabupaten Ciamis. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif analisis. Untuk menganalisis data yang diperoleh digunakan analisis deskriptif kuantitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa (1) Aksesibilitas laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis berada pada kategori sangat baik. Artinya bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis telah mampu mengaksesibilitas laporan keuangan sesuai dengan peraturan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004. (2) Transparansi laporan keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis berada pada kategori sangat baik. Artinya Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis telah melaporkan laporan keuangan secara transparan sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi laporan keuangan. (3) Aksesibilitas laporan keuangan pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi laporan keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis. Artinya bahwa semakin baik aksesibilitas laporan keuangan pemerintah daerah maka semakin baik pula transparansi laporan keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis.

Kata Kunci: Aksesibilitas, Transparansi, Laporan Keuangan Daerah.

I. Pendahuluan

Pelaksanaan otonomi daerah Kabupaten dan Kota memberikan kewenangan pengelolaan keuangan sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik diperlukan untuk mengelola dana desentralisasi secara transparan, ekonomis, efisien, efektif, dan akuntabel. Beberapa prioritas perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah penting dilakukan, terutama dalam aspek anggaran, akuntansi, dan pemeriksaan. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik difokuskan untuk mengelola dana secara desentralisasi dengan transparan, efisien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak dan kewajiban Negara yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara, dalam rangka pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara diperlukan kaidah-

kaidah hukum administrasi keuangan negara yang mengatur perbendaharaan negara. Transparansi merupakan salah satu asas yang harus dipenuhi pemerintah untuk mencapai Kepemerintahan yang baik (*good governance*). Untuk memenuhi asas transparansi kepala daerah wajib menginformasikan substansi APBD kepada masyarakat yang telah diundangkan dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 pada lembaran negara.

Pada dasarnya, Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumberdaya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Cara yang ditempuh untuk mewujudkan transparansi laporan keuangan adalah dengan mengharuskan pemerintah untuk mempublikasikan laporan keuangan agar dapat diakses publik. Masyarakat sebagai pihak yang memberi kepercayaan kepada pemerintah untuk mengelola keuangan publik berhak untuk mendapatkan informasi keuangan pemerintah untuk melakukan evaluasi pemerintah. Aksesibilitas laporan keuangan adalah kemampuan untuk memberikan akses bagi stakeholder untuk mengetahui atau memperoleh laporan keuangan sebagai bagian dari partisipasi stakeholder. Transparansi yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan pertanggungjawaban maupun laporan temuan yang dapat dibaca dan dipahami. Dalam demokrasi yang terbuka, akses ini diberikan oleh media seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, website (internet), dan forum yang memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan di Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis terdapat beberapa permasalahan dalam aksesibitas laporan keuangan. Hal ini disebabkan SIPKD sebagai media aksesibilitas laporan keuangan belum sepenuhnya digunakan secara optimal sehingga laporan keuangan daerah belum dapat dipublikasikan secara luas kepada masyarakat dan kemampuan penguasaan pengoperasian SIPKD yang belum optimal. Dimana *software* ini menuntut penggunaanya tidak hanya fasih dalam akuntansi tetapi juga dalam penggunaan komputer. Sedangkan dalam hal transparansi laporan keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis permasalahan yang ditemukan yaitu laporan kinerja keuangan pemerintah daerah kurang efisien dan transparan kepada masyarakat. Karena laporan keuangan hanya di publikasikan dalam lingkungan pemerintah saja dan Otonomi daerah masih dipahami secara sempit sehingga hanya pemerintah daerah

yang aktif, sedangkan peran serta masyarakat luas belum terkena dampaknya dan laporan keuangan yang disajikan sering terlambat karena laporan yang diberikan SKPD tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan yaitu 31 Desember.

Dari fenomena diatas, maka akan berdampak terhadap menurunnya Aksesibilitas dan transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sehingga Pemeritah Daerah Kabupaten Ciamis harus meningkatkan aksesibilitas, karena Aksesibilitas laporan keuangan merupakan sarana penunjang dalam rangka perwujudan lembaga pemerintah daerah sebagai lembaga sektor publik.

Aksesibilitas laporan keuangan akan mempengaruhi transparansi laporan keuangan daerah. Hal ini dapat terjadi karena pengelolaan keuangan daerah yang baik membuat setiap aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah dapat dipertanggungjawabkan secara finansial, oleh sebab itu, pengelolaan keuangan daerah yang baik akan menciptakan transparansi yang baik. Tuntutan dari sebuah akuntabilitas mewajibkan pemerintah daerah untuk tidak hanya melakukan pelaporan vertikal (pelaporan kepada pusat), namun juga pelaporan horizontal (pelaporan pemerintah kepada DPRD dan masyarakat luas) (Halim, 2012:20).

Aksesibilitas laporan keuangan merupakan sarana penunjang dalam rangka perwujudan lembaga pemerintah daerah sebagai lembaga sektor publik. Untuk menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pemerintah daerah harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan kepada masyarakat secara terbuka dengan mengembangkan sistem informasi keuangan daerah. Berarti dengan memberikan kemudahan akses terhadap laporan keuangan bagi para pengguna akan menciptakan transparansi pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik (Mardiasmo, 2012:31). Berdasarkan pendapat dari kedua ahli di atas, maka diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

Hipotesis: Asesibilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berpengaruh Positif Terhadap
Transparansi Laporan Keuangan.

II. Metode

Metode penelitian yang digunakan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan kuantitatif. Penggunaan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif digunakan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan fenomena terkait dengan pengaruh aksesibilitas laporan keuangan Pemerintah Daerah terhadap Tarnsparansi Laporan Keuangan. Dalam penelitian tersebut menggunakan dua variabel, yaitu aksesibilitas dan

tarnsparansi laporan keuangan pemerintah. Aksesibilitas Laporan Keuangan Pemerintah merupakan data terbuka yang dapat diketahui, diakses dan diperoleh oleh masyarakat (UU Nomor 33 Tahun 2004). Sementara itu indikator untuk mengukur aksesibilitas Laporan Keuangan Pemerintah di dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 adalah sebagai berikut:

1. Dalam publikasi laporan keuangan daerah harus mencakup APBD dan laporan realisasi APBD Kabupaten;
2. Dalam publikasi laporan keuangan daerah harus mencakup neraca daerah;
3. Dalam publikasi laporan keuangan daerah harus mencakup laporan arus kas;
4. Dalam publikasi laporan keuangan daerah harus mencakup catatan atas laporan keuangan daerah;
5. Dalam publikasi laporan keuangan daerah harus mencakup dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan;
6. Dalam publikasi laporan keuangan daerah harus mencakup Laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah;
7. Dalam publikasi laporan keuangan daerah harus mencakup data yang berkaitan dengan kebutuhan dan kapasitas fiskal daerah.

Semenatar itu keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat (Mardiasmo, 2016:30). Untuk mengukur Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menurut Mardiasmo (2016:30) adalah sebagai berikut:

1. Kemudahan mengakses kinerja dalam laporan keuangan;
2. Laporan keuangan berdasarkan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah);
3. Ketepatan waktu laporan keuangan dibuat;
4. Keakuratan laporan keuangan;
5. Laporan keuangan yang dibuat membantu pengambilan keputusan;
6. Pengungkapan laporan keuangan secara jelas;
7. Pengungkapan perbahan metode penilaian persediaan dalam laporan keuangan;
8. Pengungkapan perbahan metode penyusutan aktiva tetap dalam laporan keuangan;
9. Pengungkapan perubahan umur aktiva dalam laporan keuangan;
10. Peningkatan pengungkapan dalam laporan keuangan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari hasil penyebaran angket kepada Seluruh aparat bagian

keuangan atau bagian akuntansi saja yang ada di dinas-dinas/badan yang ada di Pemerintah Kabupaten Ciamis. Sedangkan data sekunder diperoleh dari Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Ciamis.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

1. *Observasi*, yaitu mengamati kegiatan di Dinas/badan di Kabupaten Ciamis;
2. *Angket*, yang diberikan kepada seluruh pegawai bagian akuntansi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis, dengan cara mengajukan pertanyaan yang secara logis berhubungan dengan masalah penelitian dan bersifat pertanyaan tertutup/berstruktur yang menyangkut pendapat responden tentang pengaruh aksesibilitas laporan keuangan Pemerintah Daerah terhadap transparansi laporan keuangan daerah Kabupaten Ciamis.

Teknik Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini untuk menguji pengaruh aksesibilitas laporan keuangan pemerintah daerah terhadap transparansi laporan keuangan daerah, maka langkah-langkahnya sebagai berikut:

a. Analisis Regresi Sederhana (*Simple Regression*)

Model Regresi yang digunakan adalah $Y = a + bX$ (Sugiyono, 2014: 212)

$$a = \frac{(\Sigma Y)(\Sigma X^2) - (\Sigma X)(\Sigma XY)}{n \cdot \Sigma X^2 - (\Sigma X)^2}$$

$$b = \frac{n \cdot (\Sigma XY) - (\Sigma X)(\Sigma Y)}{n \cdot \Sigma X^2 - (\Sigma X)^2}$$

Dimana :

Y = Transparansi Laporan Keuangan Daerah

X = Aksesibilitas Laporan Keuangan

a = Harga Y, ketika harga X=0 (harga konstan)

b = Angka arah atau koefisien regresi, yang menunjukkan angka peningkatkan ataupun penurunan variabel dependen yang didasarkan pada perubahan variabel independen. Bila (+) arah garis naik, bila (-) maka arah garis turun.

b. Analisis Koefisien Korelasi

$$r_{xy} = \frac{n \cdot \Sigma XY - (\Sigma X)(\Sigma Y)}{\sqrt{\{n \cdot \Sigma X^2 - (\Sigma X)^2\} \{n \cdot \Sigma Y^2 - (\Sigma Y)^2\}}} \quad (\text{Sugiyono, 2014: 212})$$

Dimana:

r_{yx} = Koefisien korelasi sederhana X terhadap Y

n = Jumlah Responden

ΣX = Jumlah total variabel X

ΣY = Jumlah total variabel Y

ΣXY = Jumlah total variabel X dikali Y

Tabel 1. Tingkat Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00-0,19	Sangat Lemah
0,20-0,39	Lemah
0,40-0,59	Sedang
0,60-0,79	Kuat
0,80-1,00	Sangat Kuat

(Sugiyono, 2014:213)

c. Analisis Koefisien Determinasi

Besar kecilnya sumbangan nilai variabel X terhadap Y dapat ditentukan dengan rumus koefisien determinasi sebagai berikut:

$$kd = r^2 \times 100 \quad (\text{Sugiyono, 2014:213})$$

Dimana:

kd = Nilai koefisien determinasi

r = Nilai koefisien korelasi

d. Uji Signifikasi (Uji t)

Pengujian Hipotesis digunakan uji-t, dengan rumus sebagai berikut:

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}} \quad (\text{Sugiyono, 2014:214})$$

Keterangan:

t_{hitung} = Nilai t

r = Nilai Koefisien Korelasi

n = Jumlah Sampel

Kaidah keputusan:

- Jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka hipotesis diterima, artinya koefisien regresi berpengaruh signifikan antara variabel X terhadap variabel Y dengan tingkat signifikansi 0,05 atau 5%.
- Jika nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka hipotesis ditolak, artinya koefisien regresi tidak berpengaruh signifikan antara variabel X terhadap variabel Y dengan tingkat signifikansi 0,05 atau 5%.

III. Hasil

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Aksesibilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis telah dilakukan dengan sangat baik. Terbukti dari hasil pengolahan kuesioner dengan diperoleh nilai sebesar 941 berada pada kriteria sangat baik. Dengan nilai tertinggi yaitu dalam laporan keuangan daerah yang akan dipublikasikan harus mencakup APBD dengan skor 101 dan nilai terendah yaitu dalam laporan keuangan daerah yang akan dipublikasikan harus mencakup catatan atas laporan keuangan daerah dengan skor 86.

Hasil penelitian ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Aksesibilitas laporan keuangan adalah data terbuka yang dapat diketahui, diakses dan diperoleh oleh masyarakat. Hal ini berarti bahwa pemerintah daerah harus membuka akses kepada *stakeholder* secara luas atas laporan keuangan yang dihasilkannya, misalnya dengan mempublikasikan laporan keuangan daerah melalui surat kabar, internet atau cara lainnya.

Aksesibilitas Laporan Keuangan adalah kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan (Mardiasmo, 2012:65). Penggunaan informasi keuangan yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan keuangan yang relevan dapat dibaca dan dipahami (Mardiasmo, 2012:65). Aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan. Jadi dengan memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan maka akan memungkinkan berjalannya fungsi kontrol yang baik terhadap pertanggungjawaban penggunaan asset daerah maupun kontrol terhadap kebijakan-kebijakan keuangan yang diambil pemerintah, baik kontrol yang dilakukan oleh badan pemeriksa, masyarakat maupun investor. Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa

aksesibilitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis kualifikasinya yaitu sangat baik. Artinya bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis telah mampu mengaksesibilitas laporan keuangan sesuai dengan peraturan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa transparansi laporan keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis telah dilakukan dengan sangat baik. Terbukti dari hasil pengolahan kuesioner dengan diperoleh nilai sebesar 921 berada pada kriteria baik. Dengan nilai tertinggi yaitu Laporan keuangan daerah telah menyajikan informasi akuntansi keuangan daerah selengkap mungkin yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan skor sebesar 98 dan nilai terendah pada Laporan keuangan yang dibuat harus tepat waktu sesuai dengan waktu yang ditentukan yaitu 31 Desember dengan skor sebesar 83. Pada dasarnya, Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumberdaya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Hasil penelitian sesuai pendapat Mardiasmo (2016:30), bahwa transparansi berarti keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Informasi keuangan yang dilaporkan oleh pemerintah daerah menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas, salah satu prasyarat untuk dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara (pusat dan daerah) adalah dengan melakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan, yakni pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan relevan secara jujur dan terbuka kepada publik, karena kegiatan pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan amanat rakyat.

Transparansi merupakan salah satu asas yang harus dipenuhi pemerintah untuk mencapai Kepemerintahan yang baik (*Good Governance*). Untuk memenuhi asas transparansi kepala daerah wajib menginformasikan substansi APBD kepada masyarakat yang telah diundangkan dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 pada lembaran negara. Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa transparansi laporan keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis kualifikasinya sangat baik. Artinya Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis telah melaporkan laporan keuangan secara transparan sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi laporan keuangan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa terdapat pengaruh positif aksesibilitas laporan keuangan pemerintah daerah terhadap transparansi laporan keuangan. Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan statistik regresi linier yang menyatakan bahwa setiap penambahan atau peningkatan variabel aksesibilitas laporan keuangan pemerintah daerah akan berdampak pada transparansi laporan keuangan. Hasil perhitungan analisis koefisien korelasi menunjukkan bahwa hubungan antara aksesibilitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan transparansi laporan keuangan sebesar 0,795. Artinya aksesibilitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan transparansi laporan keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis memiliki hubungan tinggi. Aksesibilitas laporan keuangan pemerintah daerah berpengaruh terhadap transparansi laporan keuangan sebesar 63,3%, sedangkan sisanya 36,7% dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti seperti kebijakan penyajian dan sistem akuntansi keuangan daerah.

Hasil pengujian hipotesis (uji t) diketahui bahwa nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($5,870 > 2,086$). Hal ini menunjukkan terdapat pengaruh yang positif antara aksesibilitas laporan keuangan pemerintah daerah terhadap transparansi laporan keuangan. Hal ini dapat diartikan bahwa aksesibilitas laporan keuangan pemerintah daerah baik maka transparansi laporan keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis akan baik pula. Hasil pengujian (uji F) diketahui bahwa nilai F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} ($34,474 > 2,97$). Yang artinya bahwa aksesibilitas laporan keuangan pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap transparansi laporan keuangan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Mardiasmo (2012:31) menyatakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan merupakan sarana penunjang dalam rangka perwujudan lembaga pemerintah daerah sebagai lembaga sektor publik. Untuk menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pemerintah daerah harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan kepada masyarakat secara terbuka dengan mengembangkan sistem informasi keuangan daerah. Berarti dengan memberikan kemudahan akses terhadap laporan keuangan bagi para pengguna akan menciptakan transparansi pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik.

Penelitian mengenai pengaruh aksesibilitas laporan keuangan Pemerintah Daerah terhadap transparansi laporan keuangan daerah yaitu Aliyah (2012) yang meneliti Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibililitas Laporan Keuangan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara.

Selanjutnya Handri (2014) meneliti mengenai Pengaruh Penyajian Laporan Posisi, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan SKPD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan Penyajian Laporan Posisi, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan SKPD.

Peneliti yang terakhir adalah Hahanussa (2012) meneliti tentang Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

Uraian tersebut menunjukkan bahwa indikator-indikator aksesibilitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat berpengaruh terhadap transparansi laporan keuangan hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis diketahui bahwa aksesibilitas laporan keuangan pemerintah daerah memberikan pengaruh yang positif terhadap transparansi laporan keuangan. Artinya semakin baik aksesibilitas laporan keuangan pemerintah daerah yang ditetapkan maka semakin baik transparansi laporan keuangan. Hasil penelitian ini dibuktikan hasil uji regresi yang menyatakan bahwa variabel aksesibilitas laporan keuangan pemerintah daerah akan memberikan dampak terhadap transparansi laporan keuangan.

Dari pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini mendukung hipotesis yaitu ada pengaruh positif aksesibilitas laporan keuangan pemerintah daerah terhadap transparansi laporan keuangan. Secara teori kedua hubungan variabel tersebut yaitu aksesibilitas laporan keuangan pemerintah daerah dan transparansi laporan keuangan dapat diterima. Artinya semakin baik aksesibilitas laporan keuangan pemerintah daerah yang ditetapkan maka semakin baik transparansi laporan keuangan.

IV. Simpulan

Berdasarkan pada tujuan penelitian dengan merujuk pada deskripsi dan pembahasan hasil dari penelitian, maka diambil simpulan sebagai berikut:

1. Aksesibilitas laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis berada pada kategori sangat baik. Artinya bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis telah mampu mengaksesibilitas laporan keuangan sesuai dengan peraturan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004.
2. Transparansi laporan keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis berada pada kategori sangat baik. Artinya Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis telah melaporkan laporan keuangan secara transparan sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi laporan keuangan.
3. Aksesibilitas laporan keuangan pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi laporan keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis. Artinya bahwa semakin baik aksesibilitas laporan keuangan pemerintah daerah maka semakin baik pula transparansi laporan keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis.

Daftar Pustaka

- Aliyah. 2012. *Pengaruh Penyajian Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara*. Jurnal Akuntansi dan Bisnis Vol. 8 No.2.
- Bahtiar, A. 2002. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Bastian, I. 2015. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Dwiyanto, A. 2016. *Transparansi Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Halim, A. 2014. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hanafi, M.M. 2013. *Analisis Laporan keuangan*, Yogyakarta: UPP AMK YKPN.
- Handro. 2014. *Pengaruh Penyajian Laporan Posisi Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jember*. Jurnal. Universitas Bung Hatta.
- Hehanussa, S.J. 2015. *Pengaruh Penyajian Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Ambon*. Jurnal. Unissula.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2007. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ismaya. 2016. *Kamus Akuntansi*. Bandung: Pustaka Grafika.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Pusat dan Daerah. 2005. *Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- LAN RI. 2003. *Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Dan Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta: LAN.

- Mardiasmo. 2012. *Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2016. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mulyana, B. 2016. *Akuntabilitas Laporan Keuangan*. Jakarta: Gramedia.
- Nordiawan, D. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Krina, LL. 2013. *Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi*. Jakarta: Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan.
- Rohman, A. 2009. *Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Fungsi Pengawasan dan Kinerja Pemerintah Daerah*. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis Vol. 9 No. 1. Hal 9-14*. Universitas Diponegoro Semarang.
- Sabarno, H. 2014. *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sadeli, L. 2016. *Dasar-dasar Akuntansi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Simamora, Henry. 2010. *Akuntansi Basis Pengambilan Keputusan Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Soemarsono. 2014. *Manajemen Keuangan Pemerintahan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2004 Tentang Keuangan Negara.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pengimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Warsono. 2011. *Manajemen Keuangan Perusahaan*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Wijaya, H.A.W. 2016. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.